



Kebocoran Anggaran, Ada Kekeliruan

SUNGAI RAYA – Setelah mempelajari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI belum lama ini. Wakil Bupati Kubu Raya, Hermanus menilai terdapat kekeliruan dari informasi kebocoran anggaran hingga miliaran rupiah pada APBD Kubu Raya tahun 2013 lalu.

“Soal kebocoran anggaran tahun 2013 lalu, kita sudah melakukan pertemuan dengan sejumlah SKPD terkait dan meminta inspektorat Kubu Raya melakukan pemeriksaan mendalam. Ternyata setelah diselidiki hasilnya tidak ada kebocoran anggaran hingga Rp14,8 miliar,” paparnya.

Wakil Bupati Kubu Raya ini menegaskan, setelah pihaknya mempelajari secara

detail ternyata hanya terjadi ketidaktepatan dalam penganggaran dan pemberian kode pada rekening penerima. Selain itu juga terdapat sejumlah kelemahan-kelemahan yang dilakukan instansi terkait seperti seharusnya penyaluran dana hibah tersebut ditetapkan melalui peraturan Bupati, namun hanya dilakukan oleh Kepala Dinas yang hanya bersifat administratif.

“Karena terjadi kekeliruan, kita akan memperbaiki LHP ini berdasarkan rekomendasi yang diberikan BPK. Jika dalam rekomendasi itu ada disebutkan kita harus mengembalikan sejumlah dana, tentu akan kita kembalikan, namun hingga sekarang tidak ada rekomendasi seperti

itu sehingga tidak ada yang perlu kita kembalikan karena tidak ada kerugian daerah yang terlampau besar,” ucapnya.

Kendati mengaku tidak terjadi kebocoran anggaran, namun Hermanus mengakui memang terdapat kerugian daerah yang disebabkan oleh tiga dinas tersebut, namun jumlahnya tidak sebesar seperti yang diberitakan selama ini.

“Misalnya saja di Dinas Cipta Karya dan Kebersihan, itu ditemukan kelebihan pembayaran untuk petugas kebersihan sebesar Rp200 juta dan itu sudah disanggupi oleh dinas terkait untuk pengembaliannya. Jadi angkanya tidak sampai miliaran,” terangnya.

Menurutnya berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI, memang memberikan beberapa rekomendasi kepada Pemkab Kubu Raya. Berdasarkan hal itu, kita langsung menggelar rapat bersama seluruh SKPD, untuk memenuhi rekomendasi tersebut.

“Perlu saya tegaskan, dari rekomendasi BPK-RI tersebut, tidak ada yang menyebutkan kepada Pemerintah Kabupaten Kubu Raya agar mengembalikan dana kepada negara karena dalam hal ini, negara tidak dirugikan. Hanya saja, ada beberapa catatan terhadap tiga dinas untuk memperjelas laporannya, terutama soal penyaluran dana bansos,” ungkapnya. (ash)